

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Ratna Puspa Dewi¹, Hyronimus Rowa² & Frans Dione³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ratnapuspadewi1985@gmail.com

ABSTRACT

Village development is an effort to meet the basic needs of the community, develop village facilities and infrastructure, develop the regional economy and eradicate poverty by utilizing natural resources and a sustainable environment. Community empowerment is a strategy in the concept of development that is centered on the community as the subject of development, empowerment is expected to minimize poverty and reduce unemployment and protect the community in terms of the economy. The establishment of BUMDes is part of the village government's efforts to build the community's economy so that it can improve the economy and create a prosperous society. Therefore, it is considered important to conduct research related to BUMDes empowerment in local economic development in Bekasi Regency, West Java Province. This study uses Mardikanto's theory of empowerment, and uses qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of this research discussion show that BUMDes empowerment in local economic development can be seen from: 1) Humanitarian development, with improvements in education; 2) Business development by continuously improving the community's ability to do business; 3) Environmental development, efforts to develop human resources, institutions, community capital, productive businesses and provide appropriate information in relation to the environment; 4) Institutional development is part of community empowerment that involves various institutions and organizations. The strength of this empowerment lies in four internal factors, its weaknesses lie in four internal factors. There are four external factors in this empowerment. The author's suggestion is that the government needs to continue to encourage this empowerment so that empowerment can continue to be fostered in local economic development in Bekasi Regency.

Keywords: *Empowerment, BUMDes, Local Economic Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan hal yang harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan rancangan strategi pembangunan Indonesia. Menurut Amri (2015) hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di daerah pedesaan, maka titik terpenting dalam pembangunan di Indonesia berada di wilayah pedesaan (Khairul Amri:2015). Pembangunan perekonomian di pedesaan merupakan suatu langkah untuk meminalisir adanya ketidakseimbangan ekonomi, kesenjangan daerah berkembang atau tertinggal maupun kesenjangan pendapatan penduduk.

Desa merupakan sistem pemerintahan yang menjadi bagian pemerintahan kabupaten atau kota namun dengan kewenangan untuk mengelola perkara rumah tangganya sendiri. Desa merupakan unit terkecil dari negara yang merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat, Desa secara riil menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan adanya Undang-undang ini, desa tidak lagi seutuhnya ditempatkan selaku bawahan pemerintahan kabupaten atau kota. paling dasar juga mengandung arti bahwa desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang spontan bersentuhan dan membaur dengan kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat disekitarnya setiap harinya, menjadi ujung tombak dalam hal pelayanan maupun penyelesaian berbagai sengketa sosial, setiap saat masyarakat desa dapat berbondong-bondong menyambangi pemerintah desa untuk merampungkan berbagai permasalahan yang muncul dalam warga yang terdekat mengandung makna bahwa secara geografis dan administratif pemerintahan desa dan masyarakat disekitarnya saling terhubung dan saling terjangkau satu sama lain.

Perkembangan paradigma pembangunan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. paradigma pembangunan saat ini telah mengalami perubahan dari pembangunan yang sifatnya things menjadi pembangunan yang sifatnya people atau dari pembangunan berorientasi fisik menjadi pembangunan yang berorientasi kepada manusia. Untuk itu Potensi BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal sejatinya sangat menjanjikan, Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Desa mandiri dan berdaya saing merupakan isu yang penting dan menjadi perhatian dari semua elemen masyarakat (Sofyan, n.d.). Menurut Wibowo & Alfariy (2020) supaya dapat mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing maka pemerintah perlu mengkaji dan memetakan potensi ekonomi desa sebagai sumber daya lokal, namun sayangnya belum semua desa mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal dan efektif.

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan subjek pemberi manfaat bagi warga setempat, sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan bagi warga masyarakat. Selain itu desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll. Guna mewujudkan suatu desa mandiri dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang terus meningkat, maka pemerintah dapat membuat suatu lembaga pemberdayaan yang dapat

meminimalisir kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta dapat mengayomi masyarakat desa dalam hal ekonomi.

Untuk itu, Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat penting dalam membangun sinergi yang kuat dan pengelolaan yang efektif serta berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan BUMDes dalam beberapa hal misalnya pengambilan keputusan dengan opsi sesuai dengan kepentingan bersama, partisipasi dalam pelaksanaan program setelah tahap perencanaan, dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program yang direncanakan tercapai.

Menurut data tahun 2021, terdapat 45.223 BUMDes aktif, yang secara total mempekerjakan lebih dari 20 juta orang dan menyumbang sekitar 4,6 triliun rupiah terhadap perekonomian Indonesia pada tahun itu. (Kontan.co.id, 2023) Pada tahun yang sama, sekitar 35 persen dari BUMDes yang ada terkena dampak parah dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal lebih dari 100.000 orang. (Kontan.co.id, 2023).

Berdasarkan data dari lapangan dapat diketahui dari 4 (empat) BUMDes menghasilkan keuntungan dan memberikan PAD tetapi masih sangat kecil. hal ini menjadi perhatian pemerintah desa karena BUMDes yang dijalankan belum memberikan kontribusi yang maksimal ke PADes dibandingkan dengan jumlah penerimaan dana desa di Kabupaten Bekasi yang sangat besar. Artinya desa belum mampu untuk mandiri dalam mencari sumber-sumber PAD. Desa hanya mengharapkan bantuan dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahannya tanpa ada inovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang ada di desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PADes terhadap sumber pembangunan desa yang dituangkan dalam APBDes masih sangat kecil. Oleh karena itu, Pemberdayaan BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa. BUMDes merupakan salah satu dari sekian lembaga yang diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi dasar menyelesaikan salah satu masalah pembangunan berupa kemiskinan.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama dikenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik (Hendrawati Hamid:2018).

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan (Hendrawati Hamid:2018). Pemberdayaan adalah pemberian kekuatan kepada kelompok yang dianggap lemah dan belum mempunyai kekuatan sehingga menjadi berdaya, dan hal ini merupakan

tanggungjawab dari pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mendukung pemerintah.

Istilah pemberdayaan populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (powerless) (Anwas:2019). Mardikanto mengemukakan bahwa "pemberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan". Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Sedangkan ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan. Kelemahan dalam berbagai aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuatan kepada pihak lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, R:2003). Menurut Rappaport (1984) bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupan.

Pengertian pemberdayaan tersebut lebih menekankan pada aspek pelimpahan wewenang kekuasaan, memberi wewenang atau pendelegasian kekuasaan kepada individu atau masyarakat, sehingga mampu mengatur diri serta lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi serta kecakapan yang dimilikinya. Pemberdayaan juga bukan hanya sekadar memberikan kewenangan atau kekuasaan pada pihak yang lemah saja. Sebenarnya dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dan pengajaran dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat, sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup dengan kemandirian. Seperti yang dikemukakan oleh juga oleh Parson (1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Parson bahwa yang ditekankan dari pemberdayaan adalah perolehan keterampilan yang mumpuni, pengetahuan yang sempurna serta kehidupan yang layak baru dapat mempengaruhi kehidupan orang selain dia.

Menurut Ife (1995) pemberdayaan adalah menyiapkan berbagai hal untuk masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan serta kompetensi untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat, di dalam menentukan masa depan mereka serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat sendiri. Pemberdayaan haruslah dapat mempersiapkan masyarakat dalam hal sumberdaya untuk kekuatan masa depan masyarakat, serta harus diberi kesempatan yang ditawarkan dan diberikan, pengetahuan untuk diketahui dan difahami serta dapat disadari oleh seseorang, pengetahuan bisa saja berupa fakta, konsep, teori melalui pendidikan atau pembelajaran. Selain itu juga harus dibarengi oleh kompetensi atau kemampuan dalam meningkatkan kecakapan dan kesanggupan dalam melakukan sesuatu, hal ini untuk keberlangsungan seseorang dalam memberikan pengaruh pada kehidupan komunitas masyarakat disekitar dia. Sedangkan menurut Slamet (2003) bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Sehingga dengan pemberdayaan, masyarakat mempunyai kemampuan dalam membangun kualitas dirinya serta memperbaiki tata kehidupan dirinya sendiri.

METODE

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang pusat perhatiannya bergantung pada prinsip umum yang menjadi dasar bentuk suatu fenomena kehidupan manusia, atau juga pola yang dianalisa dari indikasi sosial budaya melalui budaya masyarakat tersebut guna mendapat representasi mengenai contoh yang berlangsung. Untuk memperoleh hasil maksimal maka diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan kondisi dan sesuai objek yang akan diteliti. Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan “metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Slamet, M:2003). Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan: “Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk menggambarkan, memahami, dan mengembangkan makna oleh beberapa individu atau kelompok yang sumbernya berupa masalah sosial atau kemanusiaan. Upaya penelitian kualitatif dalam prosesnya melibatkan usaha seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dari partisipan secara spesifik, tema dari khusus ke umum yang dianalisa secara induktif dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel dalam laporan akhirnya. Partisipan dalam penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bermodel induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.”

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2019) merupakan proses penelitian yang berfokus pada masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membuat keseluruhan gambar yang kompleks, menganalisa kata, melaporkan pendapat informan secara mendetail, dan melakukan penelitian di lingkungan alami.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi Bina Kemanusiaan

Bina Kemanusiaan dalam pemberdayaan BUMDes merupakan upaya menyeluruh dalam mengembangkan ekonomi lokal di pedesaan, Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi dari 180 desa yang memiliki BUMDes, terdapat 92 Desa yang telah terdaftar dan 88 BUMDes dalam proses mendaftar. Sedangkan berdasarkan pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Bekasi dari 180 BUMDes yang ada, ada 133 berstatus perintis, 40 BUMDes bertingkat pemula, 6 berperingkat berkembang dan hanya 1 BUMDes dengan kategori maju.

Gambaran Umum BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal yang disampaikan oleh Ketua Tim (Katim) bagian ekonomi Setda Pembangunan dan Ekonomi Bapak Budi Mulyono, S.IP yang diwakilkan oleh Ibu Ismi Sebagai berikut:

“Untuk bagian Asisten Pembangunan dan Ekonomi kegiatan berupa rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi pengembangan ekonomi saja, untuk rekomendasi kebijakan sudah di tahap pembahasan dan pengkajian tetapi belum penerapan”.

Peran penting Kepala DPMD Kabupaten Bekasi sebagai sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya dibutuhkan bina kemanusiaan yang nantinya menumbuhkan semangat belajar bersama. Mardikanto & Soebianto (2017:114-117) mengatakan bahwa bina manusia sebagai tindakan utama dan terpenting yang perlu disorot di berbagai aktivitas pemberdayaan, lantaran manusia sebagai aktor pengelola manajemen itu sendiri. Adapun aspek pemberdayaan manusia

diantaranya adalah menumbuhkan keterampilan, membentuk keprofesionalan kerja, serta pelatihan dan pembinaan lainnya. Adapun kutipan wawancara pada tanggal 30 Januari 2025 yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Atong, S, STP.MM selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bekasi

“Iya telah dilakukan kegiatan bimtek diantaranya character Building Kepala Desa, peningkatan kompetensi aparatur desa setiap tahunnya yang diikuti oleh pengelola keuangan desa selain itu juga DPMD Kabupaten Bekasi menyelenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi barang manufaktur BUMDes dan jasa yang diikuti oleh jajaran kasi pemerintahan Kecamatan, para bendahara BUMDes dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)”.

Dengan demikian dalam pemberdayaan dapat mencapai tujuan salah satunya adalah menghasilkan perbaikan pendidikan dengan cara perbaikan dengan Bimtek yang diikuti Kepala Desa, Aparatur kecamatan dalam hal ini adalah jajaran kasi pemerintahan, para aparatur desa, Pengelola BUMDes dan unit pengelola kegiatan. Salah satu tujuan Bina Kemanusiaan adalah meningkatkan kemampuan stakeholder dan aparatur pengelola BUMDes agar dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan potensi yang akan dikembangkan oleh masyarakat. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan sumberdaya di BUMDes melalui keberlanjutan tingkatan pendidikan pegawai tersebut. Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang dan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan manajemen dan karyawan BUMDes siap memangku jabatan dimasa yang akan datang.

Bina Usaha

Bina usaha merupakan upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan. Upaya tersebut untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha, agar terjadi peningkatan taraf hidup pada masyarakat. Untuk itu, Bina usaha berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Dimensi bina usaha pada pemberdayaan BUMDes dilihat dari BUMDes dapat memahami potensi yang akan dikembangkan. Pendirian BUMDes berdasarkan asas musyawarah, memiliki visi dan misi organisasi yang jelas, ADRT yang sudah terbentuk serta terbentuknya badan usaha baru dan pengembangan usaha dalam peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat.

Bina usaha pada BUMDes Mangunjaya Mandiri tergambar dari kutipan wawancara sebagai berikut:

“Hal pertama adalah dengan melakukan pelatihan yang dilakukan dalam 2 atau 3 kali setahun seperti aplikasi BUMDes dari Dependen dan pelatihan hubungan kerjasama dengan bank yaitu jasa pelayanan pajak, PDAM, listrik, sedangkan e-wallet belum bisa dilakukan karena baru bekerjasama dengan tiga bank yaitu Bank BJB, Bank Mandiri dan Bank BNI”.

Segala hal dilakukan oleh desa ataupun BUMDes agar terjadi bina usaha untuk kemajuan masyarakat itu sendiri, yang pertama dilakukan adalah dengan mendatangkan atau mengikutsertakan staf BUMDes untuk mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh beberapa pihak, seperti dilakukan oleh pihak dependen dan pihak bank, terutama untuk pengadaan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti jasa pelayanan Bank, pembayaran pajak, pembayaran listrik dan PDAM, sehingga BUMDes akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya seperti koperasi semata.

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Subandi Direktur Bank Sampah Desa Mangunjaya dalam wawancara dengan penulis mengenai bina usaha:

“Kami berusaha mengedukasi masyarakat dengan bagaimana mengelola sampah ini, yang pertama adalah dengan memilah dan memilih sampah organik dan non organik. Sampah non organik dibawa ke bank sampah yang sudah dibina oleh Astra, di bank sampah, material tersebut akan ditimbang dan ditulis dibuku tabungan sampah, hingga beberapa bulan kedepan bisa diambil dalam bentuk uang, sedangkan sampah organik dikumpulkan di bank sampah di RT 22 yang nantinya akan dijadikan sebagai pakan ikan, pakan lele dan pakan budidaya maggot, serta sebagian dijadikan bahan kompos untuk dijual pada yang *membutuhkan*”.

Di Desa Mangunjaya juga dalam hal bina usaha adalah dengan mengajarkan para pelaku BUMDes serta binaannya untuk berusaha untuk menanam berbagai sayuran di lahan sempit seperti depan dan belakang rumah, atau bisa juga dengan memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan sebagai apapun, media tanam serta pupuk bisa didapat dari bank sampah yang menyediakan media kompos hasil penguraian bahan organik seperti daun, rumput, kotoran hewan dan sampah organik lainnya. Kompos ini adalah hasil dari pengumpulan sampah organik di Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes Mangunjaya di RT 12 Perumahan Villa Bekasi Indah Desa Mangunjaya yang merupakan Bank Sampah binaan dari PT Astra Internasional Cikarang Bekasi.

Bina Lingkungan

Bina lingkungan menurut Mardikanto adalah upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia, kelembagaan, modal masyarakat, usaha produktif dan menyediakan informasi yang tepat guna. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat bina lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang sering digunakan adalah: kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian berkelanjutan

Berbagai hal dilakukan oleh penggiat BUMDes yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain memberikan pelatihan terhadap pengembangan usaha. Bentuk pelatihan telah diberikan dapat dilihat melalui kutipan wawancara pada tanggal 14 Januari 2024 dengan Bapak Subandi selaku tokoh masyarakat desa Mangun Jaya yang juga sekaligus penggiat lingkungan. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Terkait Bank sampah warga masyarakat diedukasikan terkait pentingnya lingkungan bersih, selain lingkungan bersih, masyarakat juga bisa bersedekah melalui sampah”.

Masyarakat diedukasi untuk pentingnya lingkungan bersih dari sampah, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih, udara segar, banyak taman hijau. Edukasi tentang sampah dan lingkungan bersih ini membawa desa Mangunjaya masuk dalam kategori sebagai desa terbersih se Kabupaten Bekasi tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Selain menjadi desa terbersih se Kabupaten Bekasi, masyarakat juga bisa bersedekah dengan sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah binaan dari PT Astra Motor, yang sampah organiknya dipakai untuk pakan maggot, sebagian pakan ikan dan lele serta dijadikan kompos, sampah anorganiknya ditimbang di Bank Sampah untuk dijual ke pengepul setiap beberapa minggu sekali, hasilnya menjadi tabungan sampah, yang dapat diuangkan setiap beberapa bulan.

Bina lingkungan di Desa Wanajaya dilakukan oleh BUMDes Wanajaya, seperti yang diungkap dalam sesi wawancara dengan sekretaris Desa Wanajaya sebagai perwakilan Kepala Desa Wanajaya:

“Dalam penanganan sampah kami hanya baru bisa mengangkat 23 pemilah sampah, kami

berkesulitan dalam menangani sampah di desa Wanajaya yang luas dan banyak penduduk ini, memang sepatutnya desa Wanajaya mempunyai tim penanganan sampah yang bagus, tapi apa daya dana yang ada hanya cukup untuk menggarap bidang infrastruktur desa saja, honor untuk mereka yang menangani sampah sangat terbatas”.

Desa Wanajaya dalam bina lingkungan baru bisa dengan mengangkat 23 pemilah sampah saja, mereka bertugas untuk memilah sampah yang masuk di tempat pembuangan sampah sementara. Warga Desa Wanajaya yang banyak bekerja di bidang industri dan jasa sering lupa untuk membuang sampah secara rutin, mereka sibuk dengan kegiatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memperoleh kesimpulan, sebagai berikut: 1) Pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bekasi sudah baik dalam aspek bina kemanusiaan, bina usaha dan bina lingkungan, namun dalam aspek bina lembaga belum berjalan dengan baik terlihat dari pemerinkkatan BUMDes hanya satu BUMDes dengan peringkat maju. Bina usaha di Kabupaten Bekasi yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan dari aspek pengembangan ekonomi lokal, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat belum maksimal, Bina lingkungan membuat masyarakat dapat menjaga lingkungannya serta menghasilkan sesuatu dari menjaga lingkungan tersebut, masih pada tingkatan lokal belum secara menyeluruh di Kabupaten Bekasi. Sedangkan bina lembaga membuat lembaga-lembaga di desa menjadi kuat dengan mendatangkan kerjasama dengan lembaga di luar desa tersebut belum optimal; 2) Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi lokal antara lain adanya peran serta pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh BUMDes dengan adanya modal yang cukup, berbagai pelatihan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, pemerinah desa ataupun pihak dan lembaga lain yang *interest* dengan BUMDes di Kab. Bekasi. Sedangkan penghambat berasal dari kurangnya personil atau sumber daya manusia (SDM) yang mau berkecimpung di lembaga BUMDes, walaupun ada biasanya berasal dari orang-orang yang telah purna tugas, orang yang mempunyai kesibukan di tempat lain, ataupun sebagian yang memang berasal dari pendukung pemenang dalam pemilihan kepala desa dengan kemampuan seadanya. Selain itu terdapat pula kelemahan lain seperti marketing, pelatihan, bahan baku, support lembaga lain, event penting dan adanya pandemi Covid19 yang lalu; 3) Terdapat upaya dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi dalam percepatan pemberdayaan BUMDes, seperti membuat regulasi keberadaan BUMDes, melakukan berbagai pelatihan bagi pelaku BUMDes, melakukan berbagai bimtek, memberikan permodalan khusus, pemberian hibah komputer jinjing (laptop), membuat aplikasi dengan tujuan marketing produk BUMDes, menjaring industri manufaktur untuk bekerjasama dengan BUMDes, memberikan stimulus bagi BUMDes, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam program inovasi desa sehingga ekonomi lokal di Kabupaten Bekasi dapat berinovasi lewat BUMDes masing-masing Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Rachmanda Filya. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukerejo Kecamatan Bojonegoro)*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik IPDN, 19.
- Afni, N., dan Saragih, R,. (2018). *Pengaruh Budaya Organisasi*

- Agoes. (2013). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM pada PTPN III Persero Tanjung Morawa*. Jurnal Universitas Sumatera Utara, 50-63.
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Hasan. (2010). *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amir Hasan dan Gusnardi, (2018), *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, Pekanbaru: Tamankarya UNRI
- Anwas, Oos M, (2019) *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: TP
- Ayi Sofian. (2021). *Strategi Tata Kelola BUMDes dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat Di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut*. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 302-314.
- Bambang Hartono. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blakley and Leigh, E. J. (2010:1). *Planning Local Economy Development*. USA: Sage Publication.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur," dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1 No. 6, h. 1073
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Internastional Student Edition)*. Los Angeles: Sage Publication.
- David. (2004). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba 4.
- Djohani, R. (2003), *Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokratisasi Komunitas Bandung* :Alfabeta
- Emi Nurfadilah. (2016). *Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Dilihat dari Good Governace dan Sound Governance*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 1-13.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Etha Listiany Supardi. (2021). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih*. Jemma.
- Faiz Zamzami, dkk. (2018). *Audit Internal, Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fandy Tjiptono. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fatmawati, Hakim, & L, Mappamiring, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalsalang Kabupaten Gowa," dalam *Jurnal of Public Policy and Management 1*, h. 1
- Gayatri, dkk. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif, 17-31.
- George R. Terry. (1967). *The Principles Of Management*. Bandung: Gelora Massa.
- Gunawan, A. (2000). *Sosiologi Pendidikan (Analisis tentang Berbagai Problem Pendidikan)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H. Buchari Alma. (2008). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Hayati, R. N. (2023, 08 05). *Pemulihan Perekonomian Indonesia setelah Kontraksi akibat Pandemi Covid-19*. KPKNL Banjarmasin, hal. 01.
- Hendrawati Hamid, (2018), *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar, De La Macca
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Hitt michael, dkk., (1887). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Humaira, D. R. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 99 - 108.

- Ife, Jim, (1995), *Community Developmen: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*
- Iskandar Putong. (2010:1). *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismail Solihin. (2006). *Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Khairul Amri, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa" (BUMDes), dalam *Jurnal JIANA*, Vol. 13, 2015, h. 295
- Koentjoroningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antopologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kontan.co.id. (2023, 08 06). Kontan.co.id. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- Kushandajani, "Inovasi Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h. 49
- Kuswarno, E. (2013). *Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lisnawati dan Lestari, (2019) "Analisis Faktor Pembangunan Desa dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan pada Desa Bughu Aceh Besar." dalam *Publisia : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, h. 157-167.
- Lisnawati dan Lestari. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan pada Desa Bughu Aceh Besar. *Publisia : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 157-167.
- M. Asaduzzaman. (2020). *Global Encyclopedia of Public Adminsitration* , Public APolicy. Springer: Switzerland.
- M. Munir. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Alghani,dkk "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik" Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat> 2020
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, (2012).. *Konsep Pemberdayaan Sosial dan manfaatnya*, Bandung: Alfabeta
- Mario Wowor dkk. (2019). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. *Jurnal Eksekutif Fisip Universitas Sam Ratulangi*, 1.
- Mendesa PDTT. (2021). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021*. Jakarta: Mendesa PDTT.
- Mestika Zed. (2003). *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mister Candra dkk. (2020). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuasin*. Syukur *Jurnal Uhamka*, 1-9.
- Moh Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nana Sudjana. (2003). *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas.
- Noor & Rahmatillah. (2020). *Inovasi Tata Kelola Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Direktorat SMA Kemdikbud.
- Nugroho, R. R. (2002). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia dan Badiklat Kemhan.
- Pandji Anoraga. (2002). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Patton, M. (2005). *Qualitative Research*. Thousands Oaks CA: Sage Publication.

- Pemkab Bekasi. (2022). *Laporan Bupati Bekasi*. Bekasi: Pemkab Bekasi.
- Pemkab Kebumen. (2024, 05 23). Pemkab Kebumen. Retrieved from Pemkab Kebumen: <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015*
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021*
- PR. Ulin, E. R. (2005). *Qualitative Methods in Public Health: a Field Guide for Applied Research*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Ramlawati, d. (2024:3). *Pengantar Ekonomi*. Batam: Cendikia Mulya Mandiri.
- Rappaport, J. "Studies in empowerment: introduction to the Issue"
- Reny Rosari dkk. (2022). *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.
- Restu Kartiko Widi, (2010) *Asas Metodologi Penelitian*, (Graha Ilmu: Semarang
- Rodliyah, S. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosmaladewi, O. (2018). *Manajemen Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sadu Wasistiono, (2006), *Prospek Pengembangan Desa*, , Bandung: Fokusmedia
- Sarwono, J. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shadily, H. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, M. (2003), *Pemberdayaan Masyarakat dalam membentuk pola perilaku manusia*. Bogor: IPB Press
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soleh, A. (2017). *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Vol. 5 No. 1 Edisi Februari 2017, 32-52.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanto Reksohadiprodho. (2000). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Supriyadi R, (2007), "Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek," dalam Jurnal: *Journal Regional and City Planning ITB*, Vol. 18 No. 1
- T. Hani Handoko. (1984). *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Tjokroamijojo, B. (1990). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- U.N.E Pasific. (2000). *What is Good Governance*. <https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>: United Nation.
- Umrotul Khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Universitas Brawijaya. (tt). *PKDSP Buku Panduan BUMDes*. Malang: Univ. Brawijaya Malang Press.
- UU Desa Nomor 6 Tahun 2014*
- Wahyudi, A. (2016), "Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat," dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.2, No.2, 2016, h. 101-105.
- Welton, B. &. (1999). *The Key To Effective School Management*. New York: Routlegde.
- Widiastuti. (2015). *Tes dan Pengukuran Olahraga*. Jakarta: 2015.
- Wursanto. (1987). *Pokok-Pokok Perencanaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Yayat M. Herujitno. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.

Yayu Putri Senjani. (2019). *Peran Sistem Manajemen Pada Bbumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. Kumawula Unpad Bandung, 23.

Website

<https://bekasikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/613046732373df5c215ee27b/kabupaten-bekasi-dalam-angka-2024.html> diunduh tanggal 3 Desember 2024 jam 17.00 WIB

<https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2840>

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/3864>

<https://id.linkedin.com/in/mario-wowor-664b491b5>

<https://id.scribd.com/document/377127833/Strategi-Pengembangan-Potensi-Desa>

<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTE5IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat.html> diunduh tanggal 3 Desember 2024 jam 15.34 WIB

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/syukur/article/view/7437>

<https://m.antaraneews.com/amp/berita/3771966/kemendes-pdt-bumdes-tidak-perlu-punya-banyak-jenis-usaha> diunduh tanggal 20 Nopember 2024 jam 13.30 WIB

<https://setda.bogorkab.go.id/> diunduh Tanggal 30 Nopember 2024 jam 15.45 WIB

<https://youtu.be/HLaPm4cpjwE?si=swTRucAXK8bOCHqN>, diunduh tanggal 30 Nopember 2024 jam 15.56 WIB

Wikipedia. (2023, 08 05). Wikipedia. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Desa